

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- C.F. Strong. 2011. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern. Bandung : Nusamedia.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design* Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ermaya, Koswara. 2001. Teori Pemerintahan Daerah. Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan Press.
- Grindle, III. 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Hamidi. 2005. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian. Malang : UMM PRESS
- Marbun, SF. 2001. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : UII Press.
- Moelino, Anton. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Nasution, S. 2012. Metode *research*: Penelitian ilmiah. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru 1. Jakarta : Rineka Cipta.

Parsons, Wayne. 1995. *Public Policy, An Introduction To The Theory and Practice of Policy Analysis*. English : Print Book.

Sabatier, Paul. 1986. “*Top Down and Bottom Up Approaches to Implementation Research*”. *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48.

Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta Barat : PT Indeks.

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Wibawa, Samudra. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Intermedia.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 550 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Angkutan Sewa Khusus.

Peraturan Gubernur Jawa Barat No 59 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.